KETERLIBATAN KAUM AWAM KATOLIK DALAM BIDANG POLITIK
Studi Kasus di Desa Banjarsari pada Tahun 2012-2013

Prasetya Handaya Wicaksana

ABSTRACT:

Main purpose of politics is common participation for a common good, which allows the people to live well and fully in a society. Although Catholic Church may not confused religion and politics, she cannot ignore socio-political affairs. Thus, she is called to be witness of Christ who preached the Kingdom of God. Christian faith encourages the Church to have a certain attitude towards socio-political conditions in our society. To create a common good is indeed a vocation for all the faithful. This article aims to inquire the presence and role of laity as local leaders, as part of the Church's involvement in the political sphere, based on the observation in Banjarsari Village. Using a qualitative approach, this article aims to see the link between the involvement of the laity in politics with the teachings of the Catholic Church regarding politics. The results show that the values of church's teaching have been greatly lived in their participation in a society. Faith helps them to build awareness of their social and political responsibility.

Kata-Kata Kunci:

Politik, kaum awam Katolik, ajaran moral politik Katolik, masyarakat, demokrasi.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keadaan negara Indonesia dalam 15 tahun belakangan ini sudah mengalami perubahan yang luar biasa, khususnya di bidang politik. Situasi negara setelah reformasi tahun 1998 memberikan gairah baru bagi banyak orang untuk terlibat di dalam kehidupan politik. Orang tidak lagi takut untuk terlibat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin banyak orang menyuarakan pendapatnya. Munculnya banyak partai memberi gambaran tentang semakin banyaknya aspirasi masyarakat yang terserap.

Akan tetapi, di tengah kemajuan yang luar biasa tersebut, masih ada banyak permasalahan. Politik, yang seharusnya merupakan keterlibatan demi mewujudkan kesejahteraan bersama, tidak berjalan seperti semestinya.[1]

Politik merupakan medan perutusan kaum awam.[2] Maka mereka diajak untuk ikut berperan di dalam politik. Pada bidang itulah kaum awam memiliki peranan yang sangat khas. Mereka memiliki hak dan kewajiban seperti warga lainnya. Mereka juga memiliki hak-kewajiban di bidang politik guna memperjuangkan kesejahteraan di masyarakat. Keterlibatan sebagai pengurus dukuh dan desa adalah bagian dari keterlibatan awam di bidang ini. Merekalah yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat.

1.2. Tujuan Penelitian

Tesis ini disusun dengan beberapa tujuan berikut. Pertama untuk melihat bagaimana mereka yang terlibat di bidang politik praksis menghayati ajaran Gereja itu. Kedua, untuk menjelaskan Ajaran Gereja Katolik tentang keterlibatan awam di dalam bidang politik. Ketiga, untuk mengetahui implikasi Ajaran Gereja bagi kaum awam Katolik di Indonesia.

1.3. Rumusan Masalah

Politik sering dimaknai secara negatif. Politik sering kali dipahami sebagai seni melakukan kompromi.[3] Tidak jarang moralitas dan hati nurani dilupakan dalam kompromi tersebut. Meskipun begitu, bidang politik tetap merupakan sesuatu yang pokok dalam hidup berbangsa. Pemahaman dan penghayatan politik yang tepat seorang awam yang terlibat dalam kancah politik, khususnya pada tingkat akar rumput akan memunculkan sebuah tindakan yang tepat pula.

Karya tulis ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana para pelaku politik menghayati keterlibatannya dalam politik sebagai orang beriman? Kedua, apakah yang dijalankan oleh para pelaku politik tersebut sungguh-sungguh sejalan dengan ajaran Gereja? Ketiga, apakah keterlibatan kaum awam di bidang politik khususnya yang berkarya sebagai kepala desa dan kepala dukuh memiliki kaitan dengan ajaran Gereja mengenai politik?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, tesis ini memberikan salah satu contoh konkret keterlibatan kaum awam pada bidang politik sehingga pada akhirnya mampu memberikan pemahaman yang tepat kepada kaum awam mengenai panggilan khas kaum awam di tengah dunia khususnya di bidang politik. Kedua, memberikan sumbangan masukan bagi Paroki Santa Theresia Liseux, Boro dan Gereja Keuskupan Agung Semarang, khususnya komisi kerasulan awam, terkait dengan pembinaan terhadap kader-kader awam yang terlibat di bidang politik khususnya di pemerintahan. Ketiga, sebagai sumbangan pemikiran bagi Desa Banjarasri, dalam pembinaan pejabat pemerintahan setempat.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah observasi, wawancara dan metode kepustakaan.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode yang dimaksud antara lain wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan kepala desa Banjarasri dan kepala-kepala dukuh yang beragama Katolik yang berada di desa Banjarasri. Penelitian pustaka diperlukan guna mencari literatur yang berkaitan dengan Ajaran Moral Politik Katolik. Penulis menggunakan sejumlah dokumen Ajaran Sosial Gereja (ASG). Penulis membatasi penelitian ini pada sejumlah dokumen, di antaranya *Mater et Magistra*, *Pacem in Terris*, *Lumen Gentium*, *Gaudium et Spes*. Penulis mencermati pula sejumlah Nota Pastoral di bidang politik yang pernah dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan sejumlah Nota Pastoral maupun Surat Gembala yang pernah dikeluarkan oleh Gereja Keuskupan Agung Semarang. Selain itu, penulis juga memasukkan pemikiran dari beberapa teolog moral seperti Bernard Häring dan Karl-Heinz Peschke.

Di dalam penelitian ini, sumber data lain diperoleh baik lewat internet, surat kabar, sejumlah dokumen maupun data di kantor Desa Banjarasri dan sekretariat Paroki Boro. Data yang dimaksud mencakup data Monografi Desa, laporan dari Biro Pusat Statistik Kecamatan Kalibawang, dan juga statistik umat Paroki Boro. Pengumpulan data primer ini dilakukan selama tiga minggu, dimulai sejak 16 Oktober hingga 3 November 2012. Pengumpulan data primer ini dimulai dengan proses pengenalan desa, perijinan dari pastor Paroki Boro dan Kepala Desa Banjarasri, pencarian informasi terkait dengan orang-orang yang dapat dijadikan data primer, hingga proses wawancara. Dari hasil perbincangan singkat dengan sekretariat Paroki Boro, diperoleh beberapa nama pejabat pemerintah desa yang dapat dihubungi. Dari daftar nama yang ditemukan penulis memilih 10 nama yang dirasa relevan untuk penelitian ini. Pemilihan nama ini juga disesuaikan dengan jabatan mereka di masyarakat dan kemudahan untuk ditemui.

Pada 18 Februari 2013, penulis datang lagi ke Desa Banjarasri untuk melakukan wawancara ulang dengan beberapa kepala dukuh yang sudah pernah diwawancarai guna mengecek ulang data yang sudah pernah disampaikan. Pada tanggal 23 Mei 2013, penulis datang ke desa Banjarasri untuk melakukan cek silang atas data yang ada dengan mewawancarai 13 penduduk yang merupakan

perwakilan dari dukuh yang dipimpin oleh kepala dukuh yang pernah diwawancari sebelumnya. Dari tiga belas yang diwawancari, penulis mereduksi hingga tersisa sembilan orang yang dianggap mewakili. Pedoman wawancara dibuat dengan mencermati dimensi-dimensi yang terdapat dalam ajaran moral politik Katolik. Nilai-nilai tersebut meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan manusia sebagai mahluk yang bermartabat, tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum, partisipasi dalam demokrasi, solidaritas terhadap orang-orang kecil. Dimensi-dimensi ASG tersebut penulis coba rumuskan di dalam beberapa pertanyaan.

2. *LOCUS*

2.1. Pemerintahan Desa

Keberadaan pemerintah desa berkedudukan langsung di bawah kecamatan. Menurut UU no. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan Desa, disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.[4] Sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat maka pemerintah desa berperan sebagai pembina, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Seorang kepala desa dipilih langsung oleh rakyat setelah dia mencalonkan diri menurut ketentuan perundangan yang berlaku.[5] Kepala dukuh merupakan perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di tingkat pedukuhan. Seorang kepala dukuh bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di wilayah pedukuhan. Ia berperan melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan kepala desa di wilayah kerjanya. Ia dipilih melalui proses pemilihan menurut sistem yang ditetapkan pemerintah setempat. [6]

2.2. Profil Singkat Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang

Desa Banjarasri merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terletak di wilayah Perbukitan Menoreh. Desa ini berada di lahan seluas 1.142,011 Ha,[7] Batas-batas desa ini secara administratif meliputi:

Sebelah timur : Kecamatan Minggir dan Sungai Progo

Sebelah utara : Desa Banjarharjo dan Desa Banjaroyo

Sebelah barat : Desa Sidoarjo

Sebelah selatan : Desa Banjararum

Per Januari 2009, jumlah penduduk di Desa Banjarasri seluruhnya adalah 6.138 jiwa.[8] Dari data tingkat pendidikan yang didapat, penduduk di Desa Banjarasri khususnya orang tua sudah memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya. Kesadaran tersebut menunjukkan juga harapan orang tua terhadap masa depan yang lebih baik.[9] Mayoritas penduduk yang beragama Katolik yakni sebanyak 4.154 orang.[10] Pendapatan terbesar penduduk berasal dari sektor pertanian, khususnya padi.

Desa Banjarasri, kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari paroki Santa Theresia Lisieux Boro. Lebih dari 70 persen penduduk di desa ini beragama Katolik. Penulis memilih tempat ini sebagai penelitian karena sebagian dari kaum awam memiliki peran serta di bidang politik. Di tingkat desa, sejumlah orang awam memangku sejumlah jabatan di pemerintahan, mulai dari kepala desa, kepala bagian pemerintahan, hingga kepala-kepala dukuh. Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh penulis, terdapat sekitar 24 orang awam Katolik yang terlibat di dalam pemerintahan. Dari 17 dukuh yang ada di desa Banjarasri, 11 di antaranya dipimpin oleh orang Katolik. Keterlibatan kaum awam di dalam pemerintahan desa itu merupakan bagian dari keterlibatan Gereja di bidang politik. Banyaknya kaum awam yang terlibat di dalam pemerintahan menimbulkan ketertarikan bagi penulis. Penulis melihat bahwa kepemimpinan masyarakat pun bisa dibangun di tingkat lokal tidak hanya pada tingkat pusat. Persoalannya, apakah keterlibatan mereka sungguh-sungguh dijiwai oleh nilai-nilai ajaran moral Gereja tentang politik?

2.3. Paroki Santa Theresia Lisieux, Boro dan Desa Banjarasri

Dalam kaitannya dengan kehidupan Gereja Lokal, Desa Banjarasri termasuk salah satu bagian dari Paroki St.Theresia Liseux Boro (selanjutnya disingkat: Paroki Boro). Hampir sebagian besar umat Banjarasri merupakan warga Paroki Boro. Akan tetapi wilayah Paroki Boro tidak hanya meliputi Desa Banjarasri. Di dalam perkembangannya, Paroki Boro terus selalu mengembangkan arah penggembalaannya. Lingkungan pun dikembangkan sebagai basis reksa pastoral. Umat pun

semakin terlibat di tengah masyarakat sebagai pengurus RT/RW, kepala dukuh, kepala desa, camat, anggota DPRD dan lainnya meskipun umat rata-rata berprofesi sebagai petani.

3. HASIL PENELITIAN

Paparan hasil hasil penelitian ini didasarkan atas topik umum, yang kemudian diuraikan dalam topik khusus.

3.1. Motivasi Kepemimpinan Masyarakat

Ada banyak hal yang mendorong seseorang untuk menjadi pelayan masyarakat. Motivasi itu menjadi dasar dalam mengemban tugas-tugas mereka. Dalam penelitian, penulis melihat sejumlah motivasi yang mendorong orang hingga mau terlibat dalam masyarakat. Salah satu motivasi yang diungkapkan adalah kesadaran diri sebagai penduduk setempat.

> Pada dasarnya saya itu penduduk asli daerah sini, maka saya hendak kembali lagi ke desa ini. Saya sudah lama berkecimpung di sebuah LSM. Saya awalnya pindah ke sini karena mau menemani orang tua. Saya dari tujuh bersaudara..[11]

Langkah untuk mencalonkan diri di dalam pemilihan kepala dukuh tidak terlepas dari kesadaran diri sebagai putra asli dukuh yang bersangkutan. Semenjak lepas dari tempat belajarnya, dia tidak perlu berpikir panjang untuk kembali ke desanya. Ia pun mulai aktif bergabung dengan kegiatan kemasyarakatan yang ada di desanya.[12] Keprihatinan tentang kurangnya orang muda yang tertarik untuk 'menghidupi' pedukuhannya, juga menjadi pemicu untuk mencalonkan diri.

> Kesulitan di tempat ini, beberapa yang sudah memiliki gelar sarjana langsung bisa berpikir sebaiknya tidak bertempat tinggal di desa....[13]

Pengalaman yang mirip dialami oleh Utomo. Tidak adanya keberanian dari warga pedukuh-annya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dukuh menggantikan Kepala dukuh yang lama mendorongnya memberanikan diri memimpin pedukuhan.[14] Tidak semua kepala dukuh sejak awal berniat untuk menjadi kepala dukuh, misalnya menjadi kepala dukuh karena terpaksa menggantikan seorang kepala dukuh yang sudah lama pensiun.[15]

> Awalnya 24 tokoh masyarakat di dukuh berkumpul untuk menentukan calon kepala dukuh. ... Dari situ saya mendapat 13 suara. Lalu nama saya diajukan ke balai desa dan kemudian mengikuti tes di kabupaten dan diseleksi lagi. Setelah itu diumumkan di balai desa sebulan kemudian.[16]

Serupa dengan itu, Mulyana pun diajukan oleh penduduk Ngaren untuk menjadi kepala kukuh. Kebetulan saat itu ia belum memiliki pekerjaan dan oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang paling potensial.[17]Ada juga yang diminta menjadi kepala dukuh oleh camat setempat. [18]

Ada juga yang menjadi kepala dukuh karena saat itu ia memang benar-benar sedang membutuhkan pekerjaan. Karena tanggung jawab kepala dukuh lebih besar daripada pendapatan yang diterima, membuat masyarakat tidak tertarik untuk menduduki jabatan ini.

3.2. Tanggung Jawab Terhadap Kesejahteraan Umum

Politik merupakan sebuah usaha yang terarah pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Mereka yang terlibat dalam politik dalam tingkat apapun memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam berbagai bidang, para pejabat pemerintahan berusaha mewujudkan hal ini. Misalnya di sektor pertanian. Di Dukuh Kalisoko berkembang berbagai macam kelompok tani (kakao, perkebunan, tanaman pangan dan sebagainya). Berbagai kelompok tersebut memiliki jadwal pertemuan. Dalam setiap pertemuan mereka membicarakan topik khusus.[19] Ia berusaha untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan pertanian bagi masyarakat di pedukuh-annya. Diadakan pula arisan bata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Di bidang kebudayaan, dikem-bangkan kebudayaan *Baritan.* Acara ini adalah upacara syukur yang dilakukan oleh para petani atas hasil panen.[20]

Ada juga yang mengembangkan "arisan bata" dalam rangka peningkatan kesejahteraan masya-rakat. Tidak diketahui pasti siapa yang memulainya. Setiap warga yang mengikuti arisan berhak atas 3.000 buah bata dan dibuatkan rumah secara bergotong royong. Dukuh yang lain mengusahakan listrik dan jalan yang memadai.[21] Hal yang kurang lebih sama diusahakan oleh Sugiman di dukuhnya, yang memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan di pedukuhan-nya dan pembuatan sertifikat tanah.[22]

Hariadi mengajukan program pelatihan memasak, pembuatan keripik singkong dan pisang bagi ibu-ibu di dukuhnya.[23] Di Jurang Depok,

program dukuh diarahkan kepada pengembangan sektor pertanian, khususnya dengan kelompok tani yang ada, misalnya dengan berdiskusi tentang tanaman tahunan. Mulyana sebagai kepala dukuh Ngaren[24] mengaku memiliki sejumlah program misalnya mengusahakan adanya jembatan dan semenisasi rumah-rumah tempat tinggal.[25]

3.2.1. Mengembangkan Relasi Dengan Masyarakat

Upaya mengembangkan relasi dengan masyarakat salah satunya dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada warga. Saparyanto mengakui, bahwa kunjungan ke lingkungan warganya menjadi bagian penting dari kewajibannya. Pendapat Saparyanto didukung oleh Riyanto. Ia merasa mengenal dengan baik kepala dukuhnya, dan dapat berkomunikasi baik dengannya. Ia melihat kepala dukuhnya mudah bergaul dengan warganya dan mudah sekali dimintai tolong. Hal serupa juga disampaikan Bapak Antonius Seraji.[26] Pak Seraji juga mengatakan, sehari-hari ia juga biasa datang ke tempat kepala dukuh, mekipun hanya sekedar main. Senada dengan hal itu, Ibu Tini dan Ibu Supriyanti merasa bisa mengenal kepala dukuhnya.

3.2.2. Membangun Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama

Penulis melihat bahwa masing-masing pemimpin setempat juga berusaha menjaga toleransi di daerahnya masing-masing. Tidak ada konflik antar umat beragama. Ada kerjasama antar pemeluk agama dalam membangun sarana ibadah. Ketika umat Katolik membangun kapel, umat muslim juga turut bergotong royong. Demikian pula sebaliknya, saat umat Islam mendirikan mushola, umat Katolik juga terlibat bergotong royong. Sebagai minoritas, umat muslim tidak pernah kesulitan beribadah, termasuk untuk mengadakan pengajian yang mengundang jemaat dari luar daerah.[27] Suyono menilai bahwa di dukuhnya, toleransi umat beragama terus terjaga. Dalam berbagai acara mereka, semua diundang untuk sembayang bersama. Toleransi di dukuh juga terjadi karena masing-masing anggota masyarakat yang berbeda keyakinan tetap mau untuk membaur.[28]

Seperti yang dialami Poniman, meskipun ia beragama muslim di tempat yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, ia tetap dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Ibu Tini menambahkan juga meskipun di pedukuhannya mayoritas Katolik, kerukunan di pedukuhannya masih dapat tetap terjaga. Baik yang muslim maupun yang Katolik tidak pernah menunjukkan kefanatikkan mereka. Ia dapat mengenal dengan baik tetangganya yang muslim. Mereka yang muslim tetap dapat menjalankan ibadahnya dengan baik.

3.3. Partisipasi Dalam Demokrasi

Sebagian besar dukuh mengembangkan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Penulis menemukan bahwa kesadaran pengembangan budaya musyawarah terus diusahakan dan dijunjung tinggi.

Hariadi, mengakui adanya kesulitan dalam mengatur dukuh ini. Akan tetapi ia selalu mengatasinya melalui prinsip musyawarah bersama seluruh warga. Apabila ada bantuan untuk dukuhnya, maka ia akan mengundang para tokoh masyarakat sekitar. Supriyanti menguatkan pendapat Suparjo. Kegiatan musyawarah selalu dapat berjalan dengan baik. Di dalam pertemuan biasanya setiap warga dapat menyampaikan usul dan pendapatnya dengan bebas.

3.3.1. Iman dan Hidup Menggereja

Disadari atau tidak, iman berpengaruh dalam tindakan dan cara hidup sebagai pemimpin masyarakat. Sebagai bagian dari umat Katolik, kegiatan menggereja juga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pak Sindu berupaya untuk rutin pergi ke gereja setiap hari Minggu. Ia juga masih menyempatkan diri untuk hadir di dalam kegiatan lingkungan. Pak Budi juga merangkap sebagai ketua lingkungan. Bahkan ia merasa bersyukur bahwa melalui itu masih dapat tetap menjaga kehidupan rohaninya. Iman yang mereka hayati di dalam kehidupan menggereja dirasakan juga memberi pengaruh di dalam menjalankan jabatan yang mereka emban. Bambang mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 hal yang ia rasakan.

> Pertama saya bisa menjalankan tugas di pemerintahan dengan baik. Saya pun mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masyarakat yang bermacam-macam. Kedua, kita mampu menghormati orang lain. Ketiga, berhadapan denganuang, saya semakin hati-hati, apalagi berhadapan dengan beragam proyek.[29]

3.3.2. Pandangan Tentang Politik

Kesepuluh sumber yang diwawancarai mengalami kebingungan ketika kepada mereka diajukan pertanyaaan mengenai pengertian politik.

> Politik itu untuk orang pandai, bermain lidah dan mencari kemenangan kelompoknya sendiri. Politik itu persoalan partai. Saya gak ngerti kalau ngomong politik.[30]

Pak Sugiman mengungkapkan ketidaktahuannya tentang politik. Bagi Pak Parijo, ia justru tidak berpikir sama sekali tentang politik. Baginya, yang terpenting adalah dapat mengatur masyarakat dengan baik. Masyarakat yang ia pimpin dapat merasa aman dan tentram.

3.4. Rangkuman Hasil Penelitian

Penulis mengamati dan menilai bahwa penghayatan nilai-nilai ajaran politik Katolik sudah sungguh dicoba untuk dihayati dan meresap di dalam pribadi awam yang terlibat di dalam bidang "politik", di dalam konteks akar rumput, yakni usaha bersama membangun kesejahteraan masyarakat. Para narasumber memahami istilah "politik" itu sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu saja. Masyarakat memahami "politik" masih dalam arti keterlibatan di tengah partai politik. Karena menjadi kepala dukuh tidak terkait dengan partai politik, maka bagi mereka keterlibatan mereka sebagai kepala dukuh tidak terkait dengan "politik". Di tingkat akar rumput, terlebih di Desa Banjarasri, di penghayatan etika politik mewujud di dalam tindakan nyata yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat setempat. Para kepala dukuh pada umumnya mengedepankan musyawarah di dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Adanya musyawarah mendorong terbangunnya transparansi dan dengan demikian dihindari adanya sikap saling curiga.

Penulis melihat bahwa kepemimpinan politik juga dapat terjadi di tingkat lokal yakni di tingkat pedukuhan. Seorang pemimpin tidak cukup dengan visi dan misi saja. Seorang pemimpin harus mampu bijak melihat persoalan di tingkat lokal dan membuat keseimbangan di antara persoalan yang ada. Mereka berani bekerja keras dan mengayomi warganya. Berani menangani pekerjaan kotor secara langsung dan tidak hanya menerima hasil yang baik saja. Mereka mengharapkan adanya perhatian dari Gereja terhadap awam yang terlibat di bidang pelayanan publik atau bekerja di sektor pemerintahan. Sesekali waktu perlu diadakan pertemuan bersama, semacam rekoleksi.

Kekhususan Desa Banjarasri adalah bahwa masyarakat didominasi oleh penduduk yang mayoritas beragama Katolik. Situasi yang khas ini tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Gereja Katolik di wilayah Kalibawang sejak awal abad 20.[31] Melihat banyaknya awam yang berada di pemerintahan, seharusnya Gereja setempat dapat melihatnya sebagai sebuah potensi besar bagi Gereja. "Sayangnya juga, Gereja masih belum berani bergerak keluar dari zonanya. Masih sibuk dengan dirinya sendiri saja."[32]

Gereja harus bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Umat Kristen menjadi bagian dari masyarakat dunia yang mengemban tugas kewarganegaraan.[33] Tugas tersebut perlu dipandu oleh hati nurani kristiani untuk menanamkan nilai-nilai kristiani. Kehadiran Gereja di tengah masyarakat membawa warta pembebasan.[34]

> Barangkali sementara ini belum menyambung komunikasi antara Gereja dengan pemerintahan. .. Gereja belum berani memikirkan sebuah terobosan yang lebih bersifat memberdayakan. Dan lebih baik lagi jika dia (Gereja) juga dapat bersinergi dengan pemerintahan desa ... andaikata bisa bersinergi, tentu Gereja akan semakin memiliki daya. Semakin berjejaring, Gereja akan semakin berdaya... kelemahan Gereja adalah masih berpikir sesuatu yang bersifat intern. Untuk berjejaring masih lemah.[35]

Kehadiran umat Katolik di dalam pemerintahan Desa Banjarasri, khususnya sebagai kepala desa dan Kepala Dukuh, adalah bagian dari sumbangan keterlibatan Gereja bagi masyarakat. Ketika orang-orang di tengah masyarakat hanya sibuk mencela situasi yang terjadi di tengah masyarakat, kaum awam Katolik mau masuk di dalam ranah tindakan nyata. Para kepala dukuh maupun kepala desa, menampakkan keterlibatan politik nyata di tengah masyarakat. Mereka membaktikan diri demi kepentingan umum.

Penelitian terhadap kepala desa dan kepala dukuh yang beragama Katolik di Desa Banjarasri telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana keterlibatan Gereja, melalui umatnya, sungguh-sungguh diwujudkan di tengah masyarakat. Orang-orang Katolik yang mengemban jabatan sebagai kepala desa maupun kepala dukuh merupakan pemimpin-pemimpin lokal di dalam masyarakat. Bagi seorang Katolik, mengemban jabatan di sektor pemerintahan, sebagai kepala desa dan kepala dukuh merupakan partisipasi dalam usaha menciptakan kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Hasil penelitian lapangan di Desa Banjarasri menunjukkan bahwa nilai-nilai ASG di bidang politik sudah dihayati orang Katolik yang

menjabat sebagai kepala desa dan kepala dukuh di desa itu. Penghayatan tersebut nampak dari usaha mereka untuk mengembangkan kesejahteraan umum, solidaritas, toleransi dan perhatian terhadap kaum miskin, musyawarah untuk mufakat. Meskipun sebagian besar penduduk beragama Katolik, para kepala dukuh tetap melayani dengan baik penduduk yang beragama non Katolik. Di tiap pedukuhan toleransi tetap terjaga. Kekuasaan digunakan sebagai sarana untuk melayani masyarakat dan mengembangkan masyarakat.

Dari wawancara yang dilakukan kepada para kepala dukuh yang beragama Katolik, tampak bahwa mereka tidak mengenal ajaran moral politik Katolik. Mereka menyatakan lupa atau bahkan belum pernah diberi pendampingan khusus dari pihak paroki. Oleh karena itu, teori ajaran moral Gereja tentang politik seolah memiliki bentukan sendiri. Mereka pun juga tidak belajar secara khusus tentang politik. Syukurlah, semangat yang menjiwai keterlibatan mereka, toh sesuai dengan semangat yang ada di balik ajaran moral Gereja di bidang politik.

Kepemimpinan yang mereka hidupi berasal dari pergaulan dengan masyarakat dan pemimpin agama. Pastor paroki dianggap sebagai orang yang mampu membimbing mereka menjalankan tugas di tengah masyarakat. Iman Katolik menjadi terang bagi mereka dan motivasi dalam menjalani tugas mereka. Iman Katolik yang mereka terima memberikan rambu-rambu tanggung jawab sosial mereka di tengah masyarakat.

Penulis semula memiliki hipotesis bahwa kaum awam yang terlibat di bidang politik cukup memahami ajaran moral Gereja tentang politik. Akan tetapi di dalam penelitian ini, realitasnya berbicara lain.

4. PANDANGAN MORAL POLITIK DALAM GEREJA KATOLIK

Istilah politik juga menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Bernard Häring memahami politik sebagai sebuah tindakan yang terarah bagi kesejahteraan negara atau sekelompok masyarakat dalam kerangka kepentingan bersama (*common good*). Kesejahteraan bersama itu terwujud dalam aneka rupa kebaikan dan nilai.

4.1. Politik dan Kekuasaan di dalam Kitab Suci

Suatu kekuasaan diperlukan guna menjaga kesatuan di dalam masyarakat.[36] Meskipun demikian, pandangan negatif terhadap kekuasaan tidak dapat dihindari. Penyalahgunaan kekuasaan yang kerap terjadi menimbulkan sakit hati masyarakat. Oleh karena itu penggunaan kekuasaan perlu dilakukan secara bertanggung jawab.

Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menempatkan dan mendasarkan Allah sebagai pemilik kekuasaan. Kekuasaan merupakan salah satu sifat terpenting yang dikenakan pada Allah. Semua kekuasaan berasal dari Allah dan dimaksudkan untuk melayani Dia.[37]

Dalam Perjanjian Lama, kekuasaan raja benar-benar dilihat sebagai perpanjangan tangan Yahweh. Para nabi hadir sebagai pengkritik raja yang membangun kekuasaan ekonomi, politik maupun militer.[38] Para nabi senantiasa memikirkan kekuasaan dari sudut pandang Tuhan. Allah-lah yang sesungguhnya berkuasa atas segala sesuatu (bdk. Keb 11:23). Kekuasaan yang berasal dari Tuhan akan memancarkan kebijaksanaan. Kekuasaan dari Tuhan senantiasa mengalirkan kasih dan pengampunan (keb 12:18). Kekuasaan yang berasal dari kasih adalah kekuasaan yang sungguh manusiawi.

Yesus tidak membentuk sebuah gerakan politik demi sebuah tujuan kekuasaan di dunia. Ia justru mengakui hak penguasa di dunia (Mrk 12:17). Akan tetapi karena Yesus mengecam pemuka agama Yahudi yang juga merupakan pemuka bangsa Yahudi, Ia justru mendapat tuduhan pengganggu keamanan negara (Luk 23:2). Yesus menolak sikap yang mengabsolutkan bentuk tertentu kekuasaan duniawi. Berulangkali Yesus juga mencela ambisi serta nafsu kekuasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Yesus mendorong para murid menumbuhkan sikap seperti pelayan yang rendah hati dalam menjalankan kuasanya (bdk. Luk 22:24-27; 9:47; 14:7-11). Oleh karena itu, kekuasaan mesti selalu diletakkan dalam kerangka kesejahteraan umum.

Paulus menyarankan agar kekuasaan dilaksanakan dengan arif dan murah hati.[39] Dalam keluarga suami harus mengasihi istrinya (bdk. Ef 5: 25-30; Kol 3:19; 1Ptr 3:7) dan bersikap adil terhadap anaknya (bdk. Ef 6:4; Kol 3:21). Seorang hamba berhak untuk diperlakukan baik, adil serta jujur oleh tuannya (Ef 6:9; Kol 4:1). Kristus yang mengasihi semua orang hingga menyerahkan diri-

Nya di kayu salib menjadi model dari kasih tersebut.

4.2. Politik dalam Ajaran Gereja

Di dalam sejarah, pandangan dan sikap Gereja terhadap politik mengalami perkembangan. Pada awalnya Gereja bersikap anti politik tetapi kini Gereja tidak lagi bersikap anti-politik. Gereja semakin terlibat di dalam upaya-upaya memperjuangkan perdamaian di tengah dunia.[40]

Paus Yohanes XXIII adalah pelopor fase baru dalam ASG.[41] Yohanes XXIII memberi apresiasi terhadap keterlibatan umat di dunia politik ketika pemerintah sedang gencar di bidang ekonomi (MM 49). Sejak Yohanes XXIII, Gereja mulai membuka diri. Gereja tidak hanya berbicara untuk Gereja Katolik saja melainkan berbicara untuk dunia. Paus Yohanes XXIII sungguh menyadari bahwa selama ini Gereja sedikit terasing dari kehidupan nyata. Karena itu ia mencoba untuk "memulihkan hubungan nyata antara Gereja dan masyarakat; Gereja dan dunia."[42]

Paus Yohanes XXIII menekankan bahwa setiap orang harus ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan di masyarakat. Mereka berusaha sekuat tenaga mencegah, jangan sampai lembaga-lembaga itu memperkosa martabat manusia. Mereka mendorong apapun yang mengantar kepada kejujuran dan keutamaan dan berusaha menyingkirkan tiap rintangan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut.[43]*Mater et Magistra* tidak berbicara tentang sumbangan Gereja sebagai sebuah lembaga dalam membantu negara yang sedang berkembang. Sumbangan dan peran Gereja menjadi nyata melalui orang-orang kristiani yang terlibat dalam pembangunan masyarakat.[44]

Ensiklik *Pacem in Terris* menyebutkan bahwa Allah adalah dasar dari setiap tindakan moral. Oleh karenanya "masyarakat yang menjunjung tinggi perdamaian harus disertai dengan sikap hormat kepda Tuhan"[45] Prinsip ini juga menjadi dasar tata hubungan antar manusia sehingga suatu masyarakat disebut beradab dan produktif.[46]

Gaudium et Spes (GS) mengungkapkan solidaritas Gereja dengan manusia. Judul Konstitusi "Gereja Di Dunia Dewasa ini" mengungkapkan makna kehadiran Gereja di tengah dunia saat ini.[47] Masalah di bidang politik dibicarakan secara khusus dalam bagian kedua dari konstitusi ini, khususnya pada artikel 73-90.[48] Meski demikian, bagian awal dokumen ini sudah menyinggung unsur-unsur serta dasar kehidupan politik. Dalam *GS* 25 disebutkan bahwa pribadi manusia adalah dasar tatanan kehidupan politik. Demikian pula di dalam bab dua muncul sebuah uraian pandangan iman mengenai hidup manusia sebagai mahluk sosial, yang hidup di dalam masyarakat.[49] Pada dasarnya manusia bersifat sosial dan politis.[50]

GS memandang perlunya diadakan kerjasama di bidang politik dan ekonomi mengingat semakin berkembangnya ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Kerjasama itu diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan umum di dunia.[51] Kerjasama yang terjalin dengan baik ini dapat mendorong ke arah sikap dan perilaku setia kawan. Perkembangan dewasa ini menuntut setiap orang untuk menjadikan dirinya sebagai sesama bagi yang lain (*GS* 23-27).[52]

Perhatian Gereja di dalam GS didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa Gereja sebagai sakramen keselamatan ingin menghadirkan keselamatan Allah di tengah dunia. Gereja memiliki tugas untuk mewartakan kabar gembira, tidak hanya pada dirinya sendiri, melainkan ke seluruh dunia. Semuanya itu terlaksana dalam usaha keselamatan Allah.[53] Keselamatan Allah juga tampak dalam tindakan politik. Kaum awam dituntut menggunakan hak suaranya untuk menyuarakan kebenaran.[54] Setiap orang dituntut sumbangannya bagi terselenggaranya kesejahteraan umum (*GS* 30). Sikap hormat dan cinta kepada sesama juga mencakup mereka yang secara sosial, politis, maupun religius, memiliki pandangan yang berbeda. Sikap hormat itulah yang memungkinkan terjalinnya dialog (*GS* 28).

Kesejahteraan umum meliputi kondisi-kondisi yang dibutuhkan oleh semua orang untuk dapat hidup layak. Kondisi tersebut diindikasikan dengan mampu tidaknya seseorang untuk mengembangkan diri secara penuh sebagai seorang manusia.[55] Indikasi tersebut bukan berupa kemampuan seseorang untuk dapat membeli apa yang diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut meliputi lapangan pekerjaan, kesehatan, sanitasi, fasilitas air penerapan hukum yang adil, dan seterusnya. Dengan kata umum dimaksudkan bahwa setiap orang membutuhkan hal tersebut. Kondisi-kondisi tersebut diperlukan setiap untuk bisa berkembang. Oleh karena itu perlu diusahakan agar setiap orang mengambil keuntungan dari hal tersebut tanpa terkecuali.[56]

Tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab dari negara. Ajaran Sosial Gereja selalu mengaitkan tanggung jawab ini dengan pemerintah. Negara dan pemerintah ada demi kepentingan umum.[57]

Negara berperan dalam mengatur, memonitor dan membantu semua kegiatan swasta maupun perorangan dalam hidup berbangsa dan untuk memadukan kegiatan-kegiatan itu agar selaras bagi kesejahteraan umum. Adalah tugas negara untuk mengusahakan agar tiap warga negara berpartisipasi dalam kesejahteraan umum. Akan tetapi, di sisi lain, kesejahteraan umum juga merupakan tanggung jawab setiap orang. Kondisi tersebut hanya dapat diwujudkan, dipelihara, dijaga efektivitasnya bila diusahakan bersama-sama. Penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh terarah pada kepentingan penguasa melainkan kesejahteraan umum. Pemerintah juga tidak boleh hanya memikirkan kepentingan kelompok ataupun golongannya sendiri saja.[58]

4.3. Ajaran Moral Sosial Politik Katolik di Indonesia

Bidang politik sebagai medan perwujudan iman bagi kaum awam sudah lama menjadi perhatian Gereja di Indonesia. Sudah sejak lama, KWI berupaya mengajak segenap umat Katolik, khususnya kaum awam untuk meningkatkan partisipasinya dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Demikian pula di dalam tingkat Gereja lokal, Gereja Keuskupan Agung Semarang berupaya untuk terus mewujudkan Gereja yang memasyarakat.[59] Kaum awam didorong untuk mengembangkan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dengan cara demikian, semakin nyatalah upaya untuk mengikuti Yesus Kristus yang mewartakan Kerajaan Allah.

Adanya keinginan dari para uskup untuk memelihara dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah menjadi alasan diterbitkannya dokumen "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila; Hubungan Gereja dan Negara; Pedoman MAWI Bagi Umat Katolik" pada tahun 1985.[60] Para Uskup Indonesia juga menyerukan kepada kaum awam untuk membina rasa cinta kepada tanah air, sekaligus mengarahkan hati kepada kepentingan seluruh manusia. Para uskup juga menegaskan bahwa kaum awam merupakan bagian integral bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka perlu terlibat aktif dalam membangun kesejahteraan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[61] Berpolitik merupakan sebuah usaha yang luhur. Berpolitik berarti mengusahakan kesejahteraan masyarakat umum, demi kemajuan hidup bangsa sesuai dengan harkat kemanusiannya dan demi persahabatan dan perdamaian antar bangsa.[62] Para uskup kembali menyerukan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa. Pancasila menjadi dasar keterlibatan di tengah kehidupan berbangsa. Gereja-gereja lokal dalam hal ini Keuskupan juga berupaya menaruh perhatian terhadap bidang politik. Keterlibatan politik dilihat dalam perspektif sejarah keselamatan.[63] Terhadap masalah-masalah bangsa, umat beriman tidak bisa dengan mudah cuci tangan.[64]

Dalam konteks masyarakat Indoensia yang sedang berjuang mengatasi korupsi, kekerasan dan kerusakan lingkungan hidup, umat Keuskupan Agung Semarang diajak untuk terlibat secara aktif mengembangkan habitus baru berdasarkan semangat Injl (Bdk. Mat 5-7); dalam keluarga dengan menjadikan basis hidup beriman; dalam diri anak, remaja dan kaum muda dengan melibatkan mereka untuk pengembangan umat; dalam diri yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir dengan memberdayakannya.[65] Relasi yang akrab dengan Allah diwujudkan oleh Umat Keuskupan Agung Semarang dengan keterlibatan dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Di dalam mewujudkan cita-cita ini, kaum awam diharapkan semakin berperan dan berinisiatif di dalam kehidupan bersama. Salah satu bidang yang dapat dijadikan medan pengembangan habitus baru[66] adalah sosial-politik.[67]

5. KETERLIBATAN KAUM AWAM DALAM MASYARAKAT

Kaum awam terkumpul dalam satu himpunan umat Allah berkat baptisan yang telah mereka terima. Lewat pembaptisan mereka dimasukkan ke dalam tubuh Gereja. lewat pembaptisan, mereka dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Berkat sakramen penguatan, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati, dengan perkataan maupun perbuatan. Kemudian setelah memperoleh kekuatan dari tubuh Kristus dalam perjamuan suci, mereka secara konkret menampilkan kesatuan umat Allah (*LG* 11).[68]

Kaum awam mengemban "tri tugas Kristus" berkat sakramen yang telah mereka terima untuk menguduskan (imamat), mewartakan (kenabian) dan memimpin (rajawi). Ketiga tugas tersebut mereka jalankan di tengah lingkungan umat, masyarakat (dunia).[69] Kaum awam merupakan umat Allah dengan "satu Tuhan, satu iman, satu baptis" (Ef 4:5). Di situlah kaum awam mengerjakan tugas misi Gereja. Sebagai anggota umat Allah, kaum awam memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam menjalankan

tugas dan misi Gereja, Umat Allah. Dijiwai oleh Roh Kudus, kaum awam menjalankan profesi mereka sehari-hari, entah sebagai pejabat di pemerintahan, guru, teknisi, wartawan, pedagang dan sebagainya dalam semangat kristiani. Dalam semangat yang sama pula, kaum awam yang menjalankan profesinya sehari-hari secara *de facto* juga sudah dikatakan menjalankan karya misioner Gereja.[70] Dalam tugas keseharian yang dijiwai semangat kristiani, kaum awam menjalankan kerasulan awam yakni usaha kaum awam yang melaksanakan panggilan dan profesi mereka yang duniawi dalam semangat kristiani. Kaum awam dengan caranya yang khas menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia.

Konsili Vatikan II menegaskan bahwa tanggung jawab politik merupakan bagian dari perutusan para rasul dan para pengganti mereka "guna mewartakan Kristus penebus dunia kepada masyarakat".[71] Gereja juga mengajak kaum mudanya untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan politiknya bagi kepentingan manusia (GS 42).[72] Keterlibatan di dalam dunia politik disadari Gereja sebagai panggilan yang khas kaum awam di dalam kehidupan bernegara.[73] Menyadari hal ini sebagai panggilan yang khas, Gereja pun memberi seruan kepada kaum awam kepada umat beriman agar mampu memancarkan keteladanan untuk mengabdikan diri pada kesejahteraan bersama.[74] Gereja menekankan bahwa kesejahteraan umum adalah tujuan utama dari pengabdian umat beriman di dalam kehidupan bernegara.[75]

6. REFLEKSI TEOLOGIS ATAS KETERLIBATAN POLITIS KAUM AWAM DI TENGAH MASYARAKAT

Keterlibatan politik orang Katolik didasarkan atas inti pewartaan iman Kristiani yakni pewartaan akan kabar pembebasan di dalam diri Yesus Kristus yang akan memperoleh pemenuhannya saat kedatangan-Nya kembali. Penghayatan Injil masuk dan menyatu di dalam situasi nyata tersebut.[76] Melalui pembebasan tersebut, martabat manusia dipulihkan, manusia dipanggil dalam persekutuan dengan Allah dan sesama.

Cinta Allah kepada manusia membawa konsekuensi kepada manusia untuk menaruh cinta kepada sesamanya. Umat Katolik memiliki tanggung jawab terhadap kebebasan dan keselamatan sesamanya dan untuk memperhatikan kebutuhan sesamanya.[77] Menjadi orang Katolik dengan demikian menjadi orang yang terlibat pula. Keterlibatan tersebut memiliki dimensi politik.[78] Keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus harus diwartakan pula kepada sesama terutama dengan teladan hidup dan tindakan kita, supaya Kerajaan Allah semakin terwujud di tengah masyarakat. Iman memberi inspirasi kita untuk mengabdi kepada sesama dan masyarakat.

Kaum beriman menerima salib dengan bersikap peduli dengan orang-orang yang menderita.[79] Di tengah masyarakat yang terbuang, tertindas dan dirampas hak-haknya, Kristus menantikan para murid-Nya untuk mewartakan pembebasan.[80] Allah senantiasa menyampaikan rencana ilahi dalam peristiwa yang aktual di tengah masyarakat. Pewartaan Kerajaan yang menjadi tujuan utama kedatangan Yesus di tengah dunia merupakan jalan Yesus guna menyampaikan rencana ilahi dalam peristiwa aktual di tengah masyarakat.

Peristiwa salib memberikan makna politis. Kehadiran Allah tidak ditampakkan sebagai sosok penguasa kerajaan. Allah hadir justru di dalam ketidakberdayaan.[81] Keterlibatan yang ditampakkan Allah melalui Kristus menjadi pendorong bagi manusia untuk bersikap terbuka terhadap sesamanya. Kristus tidak menderita bagi diri-Nya sendiri tetapi bagi segenap umat manusia. Dengan merasakan penderitaan, manusia dimampukan untuk terlibat dalam penderitaan sesamanya. Keterlibatan untuk orang lain inilah yang mampu membendung sikap apatis di tengah masyarakat dan penderitaan Kristus tetap menjadi sesuatu yang berarti bagi kita saat ini.[82]

Kebenaran iman terlihat di dalam usah seseorang untuk mendorong inisiatif-inisiatif perubahan dalam masyarakat. Pemahaman J. B. Metz tentang politik di dalam teologi politik adalah sebagai "keseluruhan konstruksi pengetahuan, sistem nilai dan tatanan masyarakat yang menentukan hidup bersama manusia."[83] Teologi menurut pandangan Metz harus menjadi teologi yang berorientasi ke masa depan, sekaligus bersifat kritis terhadap masa sekarang. Dalam hal ini teologi menjadi berdimensi eskatologis. Warta eskatologis tersebut hendak menyingkapkan keharusan berubah dari masyarakat itu sendiri.[84] Orang beriman merupakan orang yang menghidupi janji – janji Allah dan hidup menurut janji tersebut.[85] Iman harus memiliki arti dalam hidup di tengah masyarakat. Iman juga harus operatif-aktif bukan hanya kontemplatif teoritis. Orang beriman harus bersikap kristis – dialektis terhadap zaman sekarang.

Keterlibatan kaum awam di bidang pemerintahan desa, baik sebagai kepala desa maupun Kepala Dukuh, merupakan bagian dari keikutsertaan di bidang politik. Suatu tindakan

politik tidak perlu diidentikkan dengan kegiatan di partai politik yang kemudian bermuara sebagai wakil rakyat di DPR atau DPRD. Keterlibatan politik tersebut merupakan bagian dari tindakan yang memunculkan pencerahan bagi usaha-usaha mewujudkan kepentingan bersama.

7. PENUTUP

Penelitian terhadap kaum awam di Desa Banjarasri yang terlibat di bidang politik praktis khususnya sebagai kepala desa dan kepala dukuh menjadi gambaran bagaimana nilai-nilai yang disarankan Ajaran Gereja dipraktekkan oleh umat. Hal itu kita lihat saat kita mencermati isi beberapa dokumen ASG. Setelah melakukan refleksi teologis penulis merasa perlu mengemukakan beberapa usulan pastoral.

7.1. Mendorong Kaum Muda Setempat Untuk Terlibat

Kegiatan di desa diharap mendorong kaum muda untuk mau terlibat di dalam organisasi umum seperti Karang Taruna. Di situlah mereka dapat belajar berorganisasi, mengembangkan sikap kritis terhadap lingkungannya, dan mengaktualkan semangat nasionalisme serta kepekaan sosial.

7.2. Menghidupkan Kerjasama

Baik pemerintah desa maupun pemerintah di pedukuhan perlu mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan Gereja ataupun pihak lainnya yang mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan serta sumber daya manusia di wilayahnya. Program pemerintah dan program Gereja dapat disinergikan. Gereja pun akan semakin memiliki banyak rekan di dalam membangun kerja sama.

7.3. Forum Komunikasi dan Kunjungan

Perlu diadakan Forum komunikasi yang dapat menjadi jembatan antara warga masyarakat dan pemerintah setempat. Lewat forum tersebut pemerintah dapat mengetahui permasalahan nyata yang sedang dialami warganya.

7.4. Pelatihan Bagi Kepala Dukuh Dan Pejabat Lainnya

Para pemimpin, baik Kepala dukuh maupun desa, diharapkan terampil dalam menguasai perkembangan tersebut sehingga tidak semakin tertinggal dengan masyarakat yang dilayaninya, misalnya mengadakan pelatihan komputer.

7.5. Pastor Paroki lebih Menyapa Umat

Seorang pastor berperan besar dalam menunjukkan mana yang boleh dan tidak di dalam masyarakat. Seorang pastor juga berperan di dalam menunjukkan kaitan iman dan tanggung jawab di tengah masyarakat.

7.6. Pembinaan Rohani

Para imam diharap memberikan dukungan lewat pendampingan rohani kepada kaum awam yang terlibat di dalam pemerintahan, agar kaum awam memperoleh kesadaran bahwa tanggung jawab yang mereka jalani merupakan panggilan dan perutusan. Pendampingan rohani itu dapat dilakukan lewat retret atau rekoleksi khusus bagi para pejabat pemerintahan desa termasuk para Kepala Dukuh. Bantuan itu dapat juga berupa siraman rohani, acara natalan atau paskahan bersama.

Prasetya Handaya Wicaksana
Rohaniwan dan Pemimpin Jemaat di Sebuah Paroki di Keuskupan Agung Jakarta; Alumnus Program Magister Teologi Universitas Sanata Dharma.

CATATAN AKHIR

[1] Y. Prayogo, "Menjadi Katolik di Arena Politik", dalam *Hidup*, 17 Agustus 2012. Seorang politisi dari partai Golkar misalnya, ditahan untuk suap pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Seminggu kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hamka Yandu dan Anthoni Zeidra keduanya dari partai Golkar. Mereka ditahan atas kasus aliran Dana Bank Indonesia. Lebih mengejutkan lagi adalah bahwa akhir Juli 2008 juga disebutkan bahwa 52 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, disebut Hamka Yandu telah menerima Bank Indonesia. Dan selanjutnya hingga tahun 2012 semakin banyak yang terlibat dalam berbagai kasus. Sepanjang semester pertama tahun 2008 saja misalnya, enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditahan oleh KPK. Banyaknya kasus tersebut, pada akhirnya semakin melunturkan semangat kepercayan rakyat.

[2] Mgr. Agustinus Agus, "Politik, Panggilan Kebaikan Bersama, dalam Mikhael Dua, dkk. (ed.), *Politik Katolik Politik Kebaikan Bersama,* , Penerbit Obor, Jakarta, 2008, 258.

[3] T. Krispurwana Cahyadi, *Katolik dan Politik,* Obor, Jakarta, 2006, 96.

[4] Bdk. www.datahukum.pnri.go.id, diunduh 7 Februari 2013.

[5] Bdk. www.datahukum.pnri.go.id, diunduh 7 Februari 2013.

[6] Bdk. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 63 Tahun 2011, khususnya bab IV pasal 14 mengenai mekanisme pemilihan dukuh.

[7] Persentase luas desa terhadap kecamatan berkisar 21,56 % Bdk. BPS Kulon Progo, *Kecamatan Kalibawang dalam Angka 2009.*

[8] Berdasarkan catatan jumlah penduduk perempuan yang dewasa pertahun 2008 berjumlah 2.021 jiwa, sedangkan penduduk pria dewasa berjumlah 2.409 jiwa.

[9] Data ini diperoleh dari data monografi Desa Banjarasri per tahun 2009 semester II.

[10] Data ini diperoleh dari data monografi Desa Banjarasri per tahun 2009 semester II.

[11] Wawancara pertama dengan Pak Totok.

[12] Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat adalah "program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat" www.pnpm-mandiri.org. Tujuan yang ingin dicapai melalui pnpm adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat mskin secara mandiri.

[13] Wawancara dengan Saparyanto Kepala Dukuh terpilih Tosari.

[14] Wawancara dengan Kepala Dukuh Kembang Sari, Budi Utomo.

[15] Wawancara dengan Kepala Dukuh Kalisoko, Suhartoyo.

[16] Wawancara dengan Kepala Dukuh Tirip, Suyono.

[17] Wawancara dengan Sindu Mulyana, dukuh Ngaren.

[18] Wawancara dengan Yohanes Sugiman, Dukuh Boro suci.

[19] Wawancara dengan Dukuh Kalisoko.

[20] Wawancara dengan Kepala Dukuh Kalisoko, Hartoyo

[21] Wawancara dengan Kepla Dukuh Tirip, Suyono

[22] Wawancara dengan Kepala Dukuh Boro Suci, Y. Sugiman

[23] Hariadi menceritakan bahwa dahulu di dukuhnya sering terjadi pencurian anjing. Namun setelah program neonisasi, tidak ada lagi pencurian itu. "Misalnya dulu pernah kejadian banyak warga yang sering kehilangan anjing. Biasanya hilang di pagi hari sekitar pukul 05.00 wib. Malingnya juga pernah ada yang tertangkap dan ternyata berasal dari luar Boro. Tetapi sekarang tingkat kemalingan juga sudah mulai berkurang."

[24] Pak Sindu Mulyana, terpilih sebagai Kepala Dukuh Ngaren pada tahun 1993. Sekitar tahun 2000 terjadi bencana longsor di dukuhnya. Ia pun memutuskan pindah ke Jurang Depok, Boro bersama seluruh anggota keluarganya. Meski demikian ia tetap mengemban jabatannya sebagai kepala dukuh Ngaren hingga sekarang. Bdk. Wawancara Kepala Dukuh Ngaren, Sindu Mulyana.

[25] Menurutnya, daerah Ngaren termasuk daerah rawan bencana longsor karena lapisan tanah di sana yang sangat tipis. Tahun 2000 yang lalu terjadi longsor di tempat ini setelah berlangsung hujan deras selama 2 jam lebih berturut-turut.

[26] Wawancara dengan Antonius Seraji, 24 Mei 2013.

[27] Wawancara dengan Saparyanto, Kepala Dukuh terpilih Tosari. Mengenai hal ini beliau mengatakan "Di Tosari yang memeluk agama Islam ada 9 KK. Tahun 2005 ketika orang Katolik membangun kapel, masyarakat warga Muslim juga ikut gotong royong. Demikian pula ketika warga Muslim membangun mushola, yang katolik pun ikut bergotong royong. Saat ini pun ketika warga Muslim mengadakan pengajian dapat berjalan dengan tertib, meskipun mereka juga mengundang umat Muslim dari luar pedukuhan."

[28] Wawancara dengan Kepala Dukuh Boro, Bambang. Di dukuhnya terdapat 2 KK yang beragama Muslim.

[29] Wawancara dengan Kepala Dukuh Boro, Bambang.

[30] Wawancara dengan Pak Bambang, Dukuh Boro.

[31] Bdk. Panitia 80 Tahun gereja Santa Theresia Lisieux Boro, *Ayo Gumregah Amri Dadia Berkah*, 2007, 1. Pada 20 Mei 1904, jumlah umat yang dibaptis di wilayah Kalibawang hanya 4 orang, pada bulan Desember terjadi peristiwa bersejarah yaitu pembaptisan 171 orang di Sendang Sono. Per Desember 1927 meningkat menjadi 981 orang. Pada akhir tahun 1930, seiring dengan berdomisilinya Rm. Prennthaler, SJ dan F.X. Satiman, SJ di Boro, jumlah umat di kalibawang semakin meningkat 1.366 orang katolik. Strategi misi yang dikembangkan oleh para imam saat itu, baik lewat bidang karitatif sosial, pendidikan dan kesehatan berhasil menambah jumlah baptisan umat.

[32] Wawancara dengan Rm. Budi Purwantoro, Pr, 23 Januari 2013.

[33] *Populorum Progressio* no 29-30.

[34] Lih. Hartono Budi, SJ, "Salib Kristus; Tambatan Kerahiman Allah" dalam Hartono Budi, SJ dan M. Purwatma, Pr, (ed) , *Jalan Terjal. Mewartakan Yesus yang Tersalib di Tengah Masyarakat Resiko*, 203-205.

[35] Wawancara dengan Romo Budi Purwantoro, Pr.

[36] Bdk. GS 74.

[37] Karl – Heinz Peschke, *Etika Kristiani*, 13.

[38] Inilah kemudian yang menjadi salah satu kekhasan dari Perjanjian lama, yakni adanya kritik profetis terhadap kekuasaan politis, ekonomi dan militer.

[39] Karl – Heinz Peschke, *Etika Kristiani*, 14.

[40] F. Borgias, "Meneropong Gereja yang Ramah", 197. Anti-politik di sini tidak dimengerti bahwa Gereja benar-benar tidak peduli dengan situasi politik yang terjadi di dunia saat itu. Sejak *Rerum Novarum*, Gereja juga sudah mulai menyoroti persoalan di bidang politik, namun memang bukan sebagai pokok bahasan yang utama. Pembahasan *Rerum Novarum* diawali dengan penjabaran terhadap situasi masyarakat saat itu. Perkembangan-perkembangan di bidang industri, dan sejumlah revolusi besar-besaran yang berlangsung di Eropa, menimbulkan persoalan yang sangat besar terlebih di bidang sosial khususnya masalah buruh. Lih. K. Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, 226. Lih. Juga E. Kristiyanto, *Diskursus Sosial Gereja*, 2.

[41] Tidak dapat dipungkiri bahwa sorotan tentang masalah sosial politik kenegaraan telah muncul sejak ensiklik sosial Gereja yang pertama, *Rerum Novarum.* Namun, Persoalan politik dilihat sebagai sebuah latar belakang dari persoalan ekonomi yang muncul di masa itu. Rontoknya tatanan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh revolusi industri juga menjadi salah satu latar belakang kemunculan ensiklik Rerum Novarum. Paus Leo menanggapi masalah sosial pada masa itu yaitu permasalahan kaum buruh. Masalah buruh mencakup persoalan harta dan pembagian kekayaan, kebebasan dan penghargaan terhadap pribadi manusia. Paus pun menuding bahwa sosialisme yang berkembang saat itu sebagai jalan yang keliru dan tak mampu menyelesaikan persoalan kaum buruh. Lih. E. Kristiyanto, *Diskursus Sosial Gereja*, 6.

[42] B. Kieser, *Solidaritas: 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, Kanisius: Yogyakarta, 1992, 63, 67. Demikian pula pada bagian awal dokumen ini sudah tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat klasik yang menyebutkan bahwa Gereja didirikan oleh Yesus Kristus yang bertugas membina umat manusia. Sebaliknya Gereja bertugas mengusahakan keselamatan jiwa serta kesejahteraan duniawi (MM 3).

[43] Bdk. MM 179.

[44] B. Kieser, *Solidaritas: 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, 134. "... Gereja bukan – pun tidak menganggap diri sebagai lembaga-lembaga asing di tengahnya. Kehadirannya membuahkan kelahiran baru, kebangkitan, dalam tiap orang dalam Kristus." (MM 180).

[45] Ibid.

[46] K. Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, 123.

[47] Lih. J. Brian Beneestad, " Doctrinal Perspective On The Church In The Modern World" 147.

[48] Bagian pertama konstitusi pastoral ini membicarakan tentang tema "Gereja dan Panggilan Manusia", sedangkan bagian kedua bertemakan "Beberapa Masalah yang Mendesak."

[49] Lih. B. Kieser, *Solidaritas, 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, 141.

[50] *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, 264.

[51] Bdk. GS 60.

[52] K. Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, 75.

[53] Lih. B. Kieser, *Solidaritas, 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, 140.

[54] Anna Windyartini Subekti, *Seri Puskat no. 381; Keterlibatan Sosial Politik Mahasiswa Calon Katekis Berdasar Sudut Pandang Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes Artikel 31-32, 74-76*, Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Kateketik Pusat, 2002, 5.

[55] Cloutier, David. "Modern Politics and Catholic Social Teaching", 102-104.

[56] Misalnya saja, agar setiap warga bisa memperoleh pendidikan, maka pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan bahwa setiap warga mendapatkan kesempatan tersebut.

[57] Bdk. GS 74.

[58] Lih. Tom Jacob, SJ, *Komentar pada Gaudium et Spes*, 383.

[59] Bdk. Mgr. I. Suharyo, Pr, "Refleksi Perjalanan dan Arah Ke Depan Keuskupan Agung Semarang", 295.

[60] Bdk. "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila; Hubungan Gereja dan Negara; Pedoman MAWI Bagi umat Katolik." Dalam *Spektrum*, Thn. XIII, 1987, 1-81.

[61] Lih. "Surat Gembala Konferensi WaliGereja Indonesia Mengenai Keterlibatan Sosial; Umat Katolik Berperan serta dalam mewujudkan Kesejahteraan Bersama dengan Membangun Persaudaraan Sejati.", dalam *Spektrum, XX*, no. 2, Thn. 1992, 127-136.

[62] "Surat Gembala Prapaskah "Keprihatinan dan Harapan", 81.

[63] Pada Desember 2003, Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang menerbitkan Nota Pastoral "Umat Beriman dan Panggilan Politik dalam Konteks Kemajemukan Masyarakat Indonesia". Nota Pastoral ini diterbitkan dalam kerangka Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang 2001-2005. Tema ini dipilih

dalam rangka menjawab kegelisahan dan pertanyaan umat tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menghadapi arus kehidupan politik, khususnya menghadapi pemilu 2004 saat itu. Kebingungan terjadi karena berbagai ramalan yang menyebutkan bahwa Pemilu 2004 tidak akan memberikan suau perubahan berarti. Bdk. Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang, *Nota Pastoral "Umat Beriman dan Panggilan Politik dalam Konteks Kemajemukan Masyarakat Indonesia"*, 2004, 9.

64 Bdk. Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang, *Nota Pastoral*, 19-18

65 Bdk. Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang ,"Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 2006-2010" dalam *Nota Pastoral Tentang Arah Dasar Umat Allah KAS 2006-2010*, 11.

66 Istilah ini pernah digunakan dalam SAKGI 2005. Habitus adalah dasar tindak seseorang. Dengan dasar tindak yang sudah dirumuskan oleh KWI maka diharapkan setiap orang Katolik akan memiliki moral dan tanggung jawab iman dalam setiap tindakannya. Habitus yang dimaksud dibangun berdasarkan semangat Injil (Matius 5-7) melalui latihan yang terus menerus supaya menjadi sikap hidup yang baru, baik sebagai pribadi maupun kolektif.

67 Pada bulan Januari 2011, Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang menerbitkan kembali Nota Pastoral Tentang Arah Dasar Umat Allah Keuskupan Agung Semarang 2011-2015, "Gereja yang signifikan dan relevan". Nota Pastoral ini muncul bersamaan dengan dimulainya Arah Dasar KAS 2011-2015.

68 Bdk. W. Conterius, " Tugas Misioner Gereja dan Kerasulan Awam", 58.

69 "... sementara kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian dan ragawi Kristus, menunaikan bagian mereka dalam perutusan segena umat Allah dalam Gereja dan di dunia...." (AA 2). Hal senada juga disebutkan dalam artikel 5, " Dalam melaksanakan perutusan Gereja itu, kaum awam menunaikan kerasulan mereka, baik dalam Gereja maupun di tengah masyarakat, baik di bidang rohani maupun duniawi."

70 Bdk. W. Djulei Conterius, " Tugas Misioner Gereja dan Kerasulan Awam", 64.

71 GS 76.

72 GS menyoroti hal ini dalam bagian *Bantuan yang diberikan untuk Masyarakat Dunia.* Bdk. GS 42.

73 Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, 255.

74 *Ibid*.

75 Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, 255.

76 Luisi PI, *Menentukan Pilihan Politis.*

77 P. Budi Kleden, *Teologi Terlibat; Politik dan Budaya dalam terang Teologi*, 207.

78 Paul Budi Kleden di dalam hal ini menambahkan bahwa cinta akan manusia bersifat sosial dan politis. Pemahaman akan martabat manusia yang tinggi akan menghanta Gereja di dalam keterlibatan politik. Kondisi politiklah yang menentukan sejauh mana manusia dihormati sejauh martabatnya. Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat; Politik dan Budaya dalam terang Teologi*, 208

79 Bdk. Dister, Nico S., *Teologi Sistematik 2*, 544.

80 Iman yang ditampakkan dalam masa lampau diingat dan dihidupkan kembali. Janji-janji dan harapan diolah kembali. Harapan itu mendorong orang-orang menolak pandangan totalitarian. Misi Yesus di dunia bukanlah sebuah misi politik, melainkan misi spiritual dan eskatologis. Para teolog tidak menemukan nasihat maupun Yesus langsung yang bersifat politik ataupun partisipasi Yesus dalam karir politik. Bdk. Bdk. Dister, Nico S., *Teologi Sistematik 2*, 544, 558. Moltmann juga menambahkan chiristians are placed where they are being waited upon the crucified one. In the suffering and condemned ones of this earth, Chirist is waiting upon his own and their presence." Bdk. Juga J. Moltmann, 118. Lih. E. Kristiyanto, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria*, 34-42. Lih. juga P. Budi Kleden, *Teologi Terlibat; Politik dan Budaya dalam terang Teologi*, 69.

81 Lih. P. Budi Kleden, *Membongkar Derita, sebuah Kegelisahan Filsafat dan Teologi*, 309.

82 Lih J. Moltmann, 1994, *Jesus Christ for Today's World*, 46.

83 P. Budi Kleden, *Teologi Terlibat; Politik dan Budaya dalam terang Teologi*, 69.

84 Bdk. J. Marsden, "The Political Theology Of Johannes Baptis Metz", 448; J. B. Metz, *Theology of The World*, 93-95. " The Christian eschatology therefor is not-... – a mere presential or actual eschatology, in which the passion for the future exhausts "making present" of eternity in actual moment of personal decision. Nor is Christian aschatology a mere passive waiting, in which the world and its time span appear as a waiting room, ... Christian eschatology however productive and militan eschatology, which gradually realize itself."

85 Dister, Nico S., 2004, *Teologi Sistematik 2*, 559.

DAFTAR RUJUKAN

Curran, C. E. dan Griffin, L. (ed.), 2001. *The Catholic Church, Morality and Politics; Reading in Moral Theology No. 12*, New York: Paulist Press.

Dister, N., 2004. *Teologi Keselamatan 2*, Yogyakarta: Kanisius.

Häring, Bernard, 1981 . *Free and Faithfull in Christ: Moral Theology for Priest and Laity Volume 3*, London*:* St. Paul Publication.

Jacob, T., 1968. *Komentar Pada "Gaudium et Spes" Menegenai Gereja Dalam Dunia Modern (art. 1-45)*, Jogjakarta: Diktat Mata Kuliah.

_____, 2002. *Latar Belakang Gaudium et Spes*, Jakarta: Celesty Hieronika.

Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996. *Iman Katolik*, Jakarta: Obor.

Komisi Kerasulan Awam, 1987. *Peran Serta Orang Katolik Dalam Politik*, Jakarta.

Kleden, P. (ed.), 2006. *Rancang Bersama. Awam dan Klerus*, Maumere: Ledalero.

Kristiyanto, E., 2008. *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria*, Yogyakarta: Lamalera.

Kristiyanto, E. (ed.), 2011. *Semakin Mengindonesiakan Indonesia; 50 Tahun Herarki*, Yogyakarta: Kanisius.

Krispurwana Cahyadi, T., 2006. *Katolik dan Politik.* Jakarta: Obor.

Lamb, M. L. dan Levering, M., (ed.), 2008, *Vatican II Renewal wiyhin Tradition*, Oxford: University Press.

Metz, J. B., 1969. *Theology of the World*, London, Burns & Oates.

Peschke, K.-H., 2001. *Etika Kristiani Jilid IV; Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial*, Maumere, Ledalero.

Subekti, A. W., 2002. *Keterlibatan Sosial Politik Mahasiswa Calon Katekis Berdasar Sudut Pandang Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes Artikel 31-32, 74-76*, Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Kateketik Pusat.